

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tersebut (Wardani et al., 2024). Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dinilai melalui indikator pertumbuhannya, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi merefleksikan kapasitas suatu daerah dalam mengatur pasokan barang untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dan kemampuan dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya (Anggarini, 2021). Setiap daerah memiliki keinginan yang sama yaitu mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan setiap daerah dituntut untuk memiliki strategi yang efektif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Salah satu indikator penting yang bisa dimanfaatkan guna memahami progres atau kemajuan ekonomi suatu wilayah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kawasan tersebut (BPS Indonesia, 2024). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah bruto pada semua barang maupun jasa yang tercipta melalui kegiatan ekonomi di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu tanpa memperhatikan residen atau non-residen pada faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut (BPS Kota Tanjungpinang, 2024). Terjadinya peningkatan PDRB

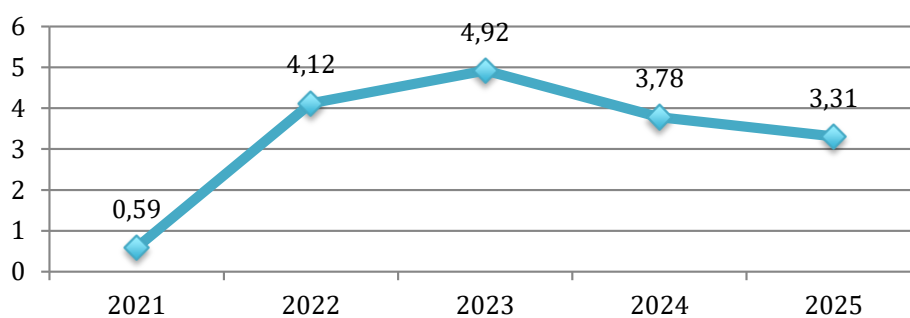
di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memiliki pemahaman mendalam atau dapat memahami faktor-faktor apa saja yang bisa untuk meningkatkan PDRB supaya dapat memberikan peningkatan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

PDRB sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pemilihan PDRB ADHK didasarkan pada kemampuannya dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara riil karena menggunakan harga pada tahun dasar yang sama. Dengan demikian, perubahan nilai PDRB ADHK lebih menunjukkan perubahan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dibandingkan perubahan harga di pasar. Sedangkan, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) masih dipengaruhi oleh inflasi atau perubahan harga setiap tahunnya. Oleh karena itu, PDRB ADHK memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai perkembangan aktivitas ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu (BPS Indonesia, 2024).

Berdasarkan data pertumbuhan total PDRB ADHK Kota Tanjungpinang menurut pendekatan pengeluaran selama periode 2021 hingga 2025 terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan. Pendekatan pengeluaran merupakan peranan dari seluruh aspek pengeluaran akhir, yang terdiri atas konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPR (PK-LNPR), konsumsi akhir

pemerintah (PK-P), dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori serta net ekspor barang dan jasa (BPS Kota Tanjungpinang, 2024). Adapun data pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang ADHK menurut pengeluaran dalam jangka waktu tahun 2021-2026 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang ADHK



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2026

Dalam menganalisis laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori untuk memudahkan analisis kondisi perekonomian daerah. Laju pertumbuhan PDRB yang berada di atas 5% dikategorikan sebagai pertumbuhan tinggi karena menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berkembang dengan optimal dan mampu menciptakan peningkatan produksi barang dan jasa secara signifikan, Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB yang berada pada kisaran 3% hingga 5% dikategorikan sebagai pertumbuhan sedang. Jika laju pertumbuhan PDRB berada dibawah 3% maka masuk kedalam kategori pertumbuhan rendah, yang mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi mengalami perlambatan sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah melalui kebijakan maupun strategi

pembangunan yang efektif untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Setelah masa covid-19 berlalu, nilai PDRB Kota Tanjungpinang membaik dengan meningkatnya nilai PDRB di tahun 2021 sebesar 0,59%. Hal ini ditunjukkan dengan naiknya seluruh nilai PDRB komponen pengeluaran yang awalnya pada tahun 2020 nilai PDRB sebesar -3,45%. Kemudian, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan menjadi 4,12%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan produktivitas secara umum.

Puncak pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang terjadi pada tahun 2023, dimana PDRB tumbuh sebesar 4,92%. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi dalam empat tahun terakhir yang mencerminkan kondisi ekonomi yang telah relatif kuat dan stabil. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan pertumbuhan menjadi 3,78% dan turun kembali pada tahun 2025 sebesar 3,31%. Meskipun masih berada pada zona positif, perlambatan ini menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan momentum pertumbuhan.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mengalami tren yang meningkat sejak 2021, namun belum sepenuhnya stabil. Perlambatan pada tahun terakhir menjadi sinyal perlunya perhatian terhadap penyebab penghambat pertumbuhan. Untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang di tahun berikutnya, maka diperlukan strategi khusus pada sektor-sektor perekonomian di Kota Tanjungpinang. Strategi yang tepat akan membuat sektor-

sektor tersebut dapat berkembang dengan sendirinya secara berkelanjutan. Ketika sektor-sektor telah berkembang sendiri secara berkelanjutan, maka akan terjadi peningkatan yang optimal pada nilai PDRB suatu daerah dan tentu akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut (Putra, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu sasaran pembangunan yang direncanakan secara sistematis melalui dokumen perencanaan pembangunan kebijakan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Melalui RPJMD dan RKPD tersebut kemudian diimplementasi melalui kebijakan dan program pembangunan daerah guna meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah bertanggungjawab atas aspek lokal seperti perencanaan pembangunan ekonomi, investasi, perdagangan, industri dan pengembangan potensi daerah yang berkontribusi pada peningkatan PDRB. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah. Perencanaan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah disusun melalui mekanisme yang berjenjang, terstruktur, dan berbasis dokumen perencanaan formal. Proses perencanaan diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen strategis dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat arah besar

pembangunan ekonomi daerah, termasuk sasaran pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi yang diinginkan, serta penguatan potensi unggulan daerah.

Kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selanjutnya dijabarkan dan disusun kembali ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode lima tahunan. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan berpedoman pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih, serta mempertimbangkan kondisi riil perekonomian daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat daya saing wilayah, tingkat pengangguran, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pada tahap ini, kebijakan pembangunan ekonomi diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas yang lebih terukur.

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan setiap tahun. RKPD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara perencanaan jangka menengah dan proses penganggaran daerah, karena menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui RKPD kebijakan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya.

Perencanaan yang disusun secara bertahap dan berjenjang tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan serta konsistensi arah pembangunan

ekonomi daerah dalam jangka panjang. Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peran dalam merumuskan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang). Bappelitbang berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD, yang di dalamnya memuat kebijakan, program, serta prioritas pembangunan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pertumbuhan PDRB. Selain itu, Bappelitbang berperan sebagai koordinator lintas perangkat daerah dalam menyelaraskan program pembangunan agar sejalan dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2018–2023 yang disusun oleh Bappelitbang, pemerintah daerah menjadikan pembangunan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, dengan menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pengeluaran daerah yang produktif, serta pengembangan potensi ekonomi setempat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Pemerintah Kota Tanjungpinang masih menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas strategi peningkatan PDRB.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang mengalami perlambatan pada tahun 2024 dan 2025 kondisi tersebut tidak langsung menunjukkan bahwa perekonomian daerah berada dalam keadaan yang

mengkhawatirkan. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bersifat dinamis yaitu dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, perubahan laju pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang wajar dan tidak selalu menunjukkan adanya permasalahan dalam perekonomian. Namun, ketika terjadi perlambatan pertumbuhan, pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi terhadap strategi pembangunan yang telah dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga secara berkelanjutan. Mengingat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sasaran utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, pemerintah perlu memastikan bahwa strategi yang diterapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada pengaruh berbagai faktor ekonomi, seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk, terhadap nilai PDRB. Ma'innah et al. (2026) meneliti di Kabupaten Malang menemukan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga yang diukur atas dasar harga konstan (ADHK) berpengaruh positif terhadap total PDRB ADHK, sehingga menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat menjadi pendorong penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

Azahra et al. (2025) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB, baik secara langsung maupun melalui jalur investasi domestik (PMDN), sehingga memperkuat argumen bahwa kebijakan

belanja pemerintah dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sunuputri et al. (2023) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan energi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PDRB dan daya saing wilayah, sehingga mendorong strategi pembangunan yang berfokus pada penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, mayoritas penelitian tersebut cenderung berfokus pada hubungan statistik antara variabel-variabel makroekonomi dengan PDRB, tanpa menggali lebih jauh bagaimana strategi pemerintah daerah disusun secara spesifik berdasarkan struktur PDRB menurut komponen pengeluaran. Kajian yang secara langsung mengaitkan PDRB ADHK menurut pengeluaran dengan perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat kota masih relatif terbatas, terutama pada konteks daerah kepulauan seperti Kota Tanjungpinang . Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan informasi PDRB menurut pengeluaran (konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan net ekspor) untuk menyusun strategi agar tren perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak berlanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan adanya analisis mengenai faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang. Selanjutnya akan ditetapkan strategi yang tepat sehingga dapat meningkatkan nilai PDRB menurut komponen pengeluaran dan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada

pencegahan PDRB agar tidak mengalami tren penurunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian yaitu "**Strategi Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kota Tanjungpinang**".

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijabarkan, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Bagaimana strategi pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tidak turun kembali kedepannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti menetapkan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis strategi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Untuk menganalisis strategi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah agar tidak turun kembali kedepannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 aspek manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua akan diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil temuan dari penelitian ini bisa menjadi acuan penting bagi penelitian mendatang yang terfokus pada identifikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan komponen pengeluaran serta strategi peningkatan PDRB di suatu wilayah.
- b. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan positif yang mendeskripsikan PDRB berdasarkan komponen pengeluaran dan strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan dari penelitian ini dijadikan saran kepada pemerintah atau pemangku jabatan Kota Tanjungpinang dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang.

- b. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat Tanjungpinang terkait strategi peningkatan PDRB sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang.

